

MENGENAL PELUANG DAN TANTANGAN PRAKTIK PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Risky Novialdi¹ dan Saddam Rasanjani²

¹Prodi Hubungan Internasional, Universitas Almuslim, Bireun, Indonesia

²Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

(Penulis korespondensi: hera.aldyra@gmail.com)

Diterima: 11 Desember 2022; Disetujui: 28 Desember 2022; Publikasi: 31 Desember 2022

Abstrak

Kesadaran dalam melakukan kerjasama internasional harus ditumbuhkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dinamisnya perkembangan dunia mengharuskan pemerintah pusat menjadi lebih terbuka dalam setiap peluang yang ada demi pembangunan yang lebih merata. Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengembangkan teori dan konsep dalam proses analisis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber terbuka lainnya. Adapun tujuan utama dalam tulisan ini adalah untuk mengungkap peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia dalam praktik paradiplomasi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan hasil kajian, peluang pemerintah daerah dalam ekspansi internasional di kawasan Indo-Pasifik cukup potensial karena negara wilayah di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak kesamaan yang menjadi salah satu indikator krusial dalam praktik paradiplomasi. Kesempatan ini sayangnya belum berjalan secara maksimal karena banyak praktik paradiplomasi yang sejauh ini tengah berjalan hanya sampai pada tahap perjanjian bersama atau MoU saja; kemudian adanya pandemi yang membuat sejumlah hubungan bilateral terpaksa vakum; dan masalah teknis lainnya. Walaupun begitu, pemerintah pusat harus terus berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertaji dalam kerjasama luar negeri dalam lingkup kawasan.

Katakunci: Paradiplomacy; Indo-Pacific Region; Pemerintah Daerah.

Abstract

Awareness in conducting international cooperation must be raised by the central government to local governments. The dynamic development of the world requires the central government to be more open in every opportunity that exists for a more equitable development. This paper uses qualitative research methods by developing theories and concepts in the analysis process based on data collected from books, journals, and other open sources. The main objective of this paper is to uncover the opportunities and challenges faced by local governments in Indonesia in the practice of paradiplomacy, especially in the Indo-Pacific region. Based on the results of the study, the opportunities for local governments in international expansion in the Indo-Pacific region are quite potential because regional countries in the Indo-Pacific region have many similarities which are one of the crucial indicators in the practice of paradiplomacy. Unfortunately, this opportunity has not run optimally because many para-diplomacy practices that have been running so far have only reached the stage of a collective agreement or MoU; then there was a pandemic that forced a number of bilateral relations to be vacuumed; and other technical problems. Even so, the central government must continue to play an active role in encouraging local governments to be more ambitious in foreign cooperation within the region.

Keywords: Paradiplomacy; Indo-Pacific Region; Local Government.

PENDAHULUAN

Gagasan terkait terbentuknya wilayah atau kawasan tentu saja merupakan artefak sejarah manusia yang relatif modern, walaupun masih ada perdebatan tentang siapa yang menemukan siapa? Mengapa dan bagaimana? Sehingga tidak ada yang alami, abadi, atau esensial tentang pembentukan wilayah atau kawasan. Poin umumnya jelas bahwa kemajuan dalam navigasi dan eksplorasi membuat koneksi menjadi mungkin antara tempat-tempat yang secara geografis terpencil, gagasan tentang adanya wilayah yang berbeda dan terpisah itu tidak realistis lagi dengan perkembangan zaman (Wilson, 2018). Hal yang perlu disadari bersama bahwa eksistensi suatu wilayah sangat penting saat ini karena daya tawarnya yang bisa membuka kerjasama pengembangan negara untuk menggapai kemajuan ekonomi yang lebih besar.

Terdapat banyak wilayah atau kawasan di belahan dunia ini, seperti; Asia Pasifik, Uni Eropa, Asia Tenggara, dan masih banyak yang lain sebagainya. Diantara sekian banyak wilayah yang terbentuk di dunia ini, ada satu wilayah yang banyak mencuri perhatian dunia dikarenakan memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi dalam berbagai aspek; bahkan wilayah ini telah menjadi rumah bagi sekitar dua pertiga total dari populasi dunia, dan wilayah itu disebut dengan Kawasan Asia Pasifik (Poot & Roskrug, 2020). Kawasan Asia Pasifik yang diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan salah satu kawasan yang berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan perekonomian dunia (Mahriun & Putri, 2020). Dan terdapat salah satu sub-kawasan yang paling strategis di kawasan ini yakni sub-kawasan yang bernama Indo-Pasifik. Istilah Indo-Pasifik muncul dan mulai dikenal sebagai konsep geografis yang meliputi wilayah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sejak Guurpet S. Kurana menggunakan kata “Strategi Indo-Pasifik” pada tahun 2007 sebagai ahli strategi kelautan dan Direktur Eksekutif Yayasan Kelautan Nasional New Delhi (Herindrasti, 2019).

Isu yang sering dibicarakan saat mendiskusikan kawasan (termasuk Indo-Pasifik) adalah geopolitik, keamanan, perdagangan internasional, dan isu politik tinggi lainnya. Kemudian aktor utama dalam interaksi dalam hubungan internasional tersebut adalah negara. Sebelum memasuki abad 21, praktik diplomasi memang didominasi oleh aktor negara atau organisasi internasional. Namun, seiring dengan perkembangan pengetahuan dan praktik diplomasi, kini para pelaku diplomasi ikut berevolusi. Dalam artian, saat ini sub-negara di suatu negara, baik itu provinsi maupun kota, juga bisa melakukan kegiatan diplomasi, atau yang lebih dikenal dengan paradiplomasi. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakiem & Susilowati (2020) bahwasanya melakukan hubungan internasional tidak hanya dimiliki oleh

pemerintah pusat di suatu negara, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan tersebut melalui praktik paradiplomasi.

Kondisi arah politik saat ini dan pengaruh globalisasi membuat pemerintah daerah cenderung ingin melakukan kerjasama luar negeri (Aldecoa & Keating, 2013). Lebih lanjut, kegiatan paradiplomasi dapat menjadi langkah strategis untuk memajukan suatu daerah (Magam, 2021). Perubahan tatanan zaman yang kini membuat provinsi dan kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk berdiplomasi adalah peluang bagi pemerintahan lokal untuk mengembangkan daerahnya dan memenuhi kebutuhan spesifiknya dengan bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten/kota lain di luar negeri. Dan merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia yang tergabung dalam negara-negara Indo-Pasifik yang berada di kawasan strategis dalam konteks geografis, budaya, dan demografis, karena praktik paradiplomasi akan lebih efektif.

Secara umum, praktik paradiplomasi menjanjikan peluang yang cukup besar dalam interaksi hubungan internasional saat ini. Pemerintah daerah di Indonesia dapat memperjuangkan kebutuhan khusus mereka dengan bekerja sama dengan mitra strategis di luar negeri. Namun seiring dengan peluang tersebut, beberapa tantangan harus dihadapi, antara lain; (i) beberapa daerah yang belum memiliki kelembagaan yang jelas untuk melakukan kegiatan paradiplomasi; (ii) pemerintah daerah belum mengetahui kekuatan yang digunakan untuk kegiatan paradiplomasi; (iii) dan regulasi yang belum memberikan ruang bagi kegiatan paradiplomasi (Mukti, 2018). Sementara itu, tantangan yang dihadapi paradiplomasi di suatu kawasan, dalam konteks kawasan di Indo-Pasifik, juga sama dengan tantangan paradiplomasi pada umumnya. Namun, juga terdapat beberapa hal memunculkan permasalahan yang berbeda yang lebih kompleks dari permasalahan umum.

Nganje (2014) mengakui akan adanya potensi dan manfaat dari paradiplomasi, menurutnya, komitmen pejabat pusat untuk menyelaraskan paradiplomasi dengan kebijakan luar negeri dan prioritas nasional adalah kunci untuk mengelola paradiplomasi agar mampu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, Chatterji & Saha (2017) menilai kehadiran paradiplomasi memunculkan perdebatan tentang kontrol pusat versus otonomi daerah, hal ini terkait dengan ancaman bagi negara berdaulat; disamping juga terdapat keyakinan bahwa praktik paradiplomasi ini dapat menuai keuntungan terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Sementara itu, Jackson (2018) melihat perdebatan seputar sifat dan praktik paradiplomasi lebih ke arah geografi politik, ia menyarankan bagaimana wawasan teoretis dan metodologis dari geografi politik dapat terjalin secara produktif dengan studi paradiplomasi,

dengan membangun wawasan tersebut memungkinkan paradiplomasi lebih berkontribusi pada proyek geografi politik yang sedang berlangsung.

Sejumlah penelitian terdahulu yang tersebut di atas telah memberikan pandangannya terkait dengan peluang dan tantangan dari praktik paradiplomasi. Keberhasilan praktik paradiplomasi di tiap kawasan akan berbeda, dan hal tersebut tergantung dari kebijakan nasional yang sedang dijalankan dan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan seluasnya bagi pemerintah daerah dalam kesempatan paradiplomasi. Selain itu, dalam konteks geopolitik diperlukan sebuah wawasan yang tersistematis agar apa yang diupayakan oleh aktor yang berkepentingan di sebuah kawasan bisa berlangsung sesuai dengan keinginan. Simons (2019) menyatakan bahwa penguasaan geopolitik mampu membuka potensi untuk menciptakan jaringan dan hubungan global, sementara itu, kendala geopolitik akan menghasilkan pengekangan tradisional yang membuat ruang dan waktu menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membangun hubungan internasional antar kawasan mengingat adanya kesamaan geopolitik yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini akan menggali peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia ketika praktik paradiplomasi dilakukan di kawasan Indo-Pasifik yang sepertinya belum ada yang spesifik mengangkat potensi wilayah ini. Pembahasan dalam makalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama akan membahas perkembangan praktik paradiplomasi. Kedua, kita akan membahas peluang praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga, akan membahas tantangan yang akan dihadapi dalam praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik.

KERANGKA TEORITIS

Istilah paradiplomasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Basque yang bernama Panayotis Soldatos dalam debat ilmiah pada tahun 1980-an (Paquin, 2020). Paradiplomasi mulanya adalah penggabungan kata ‘paralel’ dengan ‘diplomasi’ yang menghasilkan kata paradiplomasi, dimana memiliki korelasi dengan arti kebijakan luar negeri non-pemerintah pusat (Liu & Song, 2020). Desentralisasi ranah diplomatik global dengan secara tidak sengaja telah meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dari seluruh dunia dalam urusan luar negeri (Cornago, 2018), maka dengan begitu paradiplomasi telah menunjukkan kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional selain negara (Kuznetsov, 2020; Tavares, 2016). Dengan begitu, paradiplomasi yang mengacu pada kegiatan lintas negara yang dilakukan oleh aktor sub-negara, baik provinsi maupun kota adalah sebuah

peluang nyata di depan mata bagi pemerintah daerah untuk berbicara lebih banyak di kancah internasional.

Paradiplomasi telah menjadi fungsi utama nasionalisme tanpa kewarganegaraan, disini menunjukkan bahwa proses nasionalisme (konstruksi identitas dan teritorial politik) secara logis mengarah pada pemerintah daerah yang mengejar pengembangan kepribadiannya secara internasional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Moreno (2016) yang menganggap paradiplomasi telah berfungsi sebagai sarana identifikasi identitas dan pembangunan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi atau kota dalam suatu negara yang berdaulat. Secara kelembagaan, memang tidak ada penentangan oleh pemerintah pusat terkait dengan usaha pemerintah daerah untuk mengembangkan dirinya lebih jauh, dikarenakan jenis kemandirian yang dihasilkan oleh paradiplomasi ini justru akan mampu meringankan kerja dari negara dalam meningkatkan derajatnya di mata dunia.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan literasi di bidang Hubungan Internasional, kajian paradiplomasi belum terlalu massif dibandingkan dengan kajian sub-lainnya dalam disiplin ilmu yang sama. Walaupun begitu, sejumlah peneliti menyadari akan eksistensi akademik dari paradiplomasi dan telah mengangkat tema ini dalam penelitiannya. Bagian ini akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya tentang praktik paradiplomasi. Penelitian Alan Tidwell (2021) yang berjudul *“Strategic Competition and the Evolving Role of Indo-Pacific Paradiplomacy”* menemukan bahwa saat ini negara-negara di kawasan Indo-Pasifik harus bergerak aktif melibatkan kawasan dalam menjalankan suatu program, agar persaingan dan perkembangan ekonomi di kawasan yang saat ini terjadi tidak hanya melibatkan antar Negara saja, tetapi juga membuka kemungkinan kerjasama antar pemerintah daerah (Provinsi atau Kota). Jika inisiatif tersebut tidak dicoba untuk dimulai, pemerintah daerah yang selama ini cukup tertinggal akan mengalami masalah serius dalam pertumbuhan ekonominya. Namun, tantangan yang terjadi adalah paradiplomasi di kawasan, akan menguji kekuatan legislatif dan konstitusi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Herish Khali Mohammed dan Francis Owtram (2014) dalam artikel penelitiannya yang berjudul *“Paradiplomacy of Regional Governments in International Relations: The Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government (2003-2010)”* menjelaskan bahwa praktik kerjasama internasional dalam praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Kurdistan tidak menunjukkan indikasi separatisme terhadap Negara Irak, malahan praktik paradiplomasi yang dilakukan berkontribusi untuk kemajuan ekonomi di wilayah Kurdistan. Salah satu kekhawatiran yang banyak dialami oleh pemerintah pusat dalam praktik paradiplomasi adalah terhadap daerah-daerah yang memiliki hubungan konflikktual dengan pemerintah pusat yang

akan dicurigai melakukan semua kegiatan hubungan internasional yang menggoyahkan kedaulatan negara.

Praktik paradiplomasi juga mempengaruhi penguatan keamanan internasional di suatu kawasan. Gilberto Marcos Antonio Rodrigues dan Thiago Mattioli (2017) dalam artikelnya yang berjudul *“Paradiplomacy, Security Policies and City Networks: the Case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit”* menjelaskan bahwa jaringan pemerintah daerah berperan dalam menyebarkan nilai-nilai penting di kawasan, termasuk terkait keamanan. Sebagai contoh, salah satu kota di kawasan Amerika Latin yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyebaran kebijakan secara horizontal. Dalam hal ini, jaringan kerjasama antar kota telah memainkan peran penting dalam menyebarkan pengalaman dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks lokal serupa di tempat lain, bahkan di negara lain.

Martin Kossa, Marina Lomaeva dan Juha Saunavaara (2021) juga menggunakan konsep paradiplomasi dalam penelitian mereka yang berjudul *“East Asian subnational government involvement in the Arctic: a case for paradiplomacy?”*. Artikel ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah di kawasan Asia Timur aktif dalam praktik paradiplomasi, terutama dalam kerjasama terkait pengembangan jalur transportasi baru di kawasan Samudra Arktik. Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memperjuangkan kebutuhan ekonominya sendiri untuk kemajuan daerahnya, terutama dalam memanfaatkan kondisi geografis di daerahnya.

Sebuah artikel oleh Francesca Dickson (2014) yang berjudul *“The Internationalization of Regions: Paradiplomacy or Multi-level Governance?”* menjelaskan hubungan suatu daerah dengan pihak luar. Disini dijelaskan bahwa konsep multi level governance dapat dilakukan dalam suatu kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah, termasuk praktik paradiplomasi. Dengan membuka keran kerjasama seuasnya bagi pemerintah daerah, maka praktek paradiplomasi memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan kebijakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah.

Sebuah buku menarik tentang paradiplomasi yang diedit oleh Francisco Aldecoa dan Michael Keating (2013) dengan judul *“Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments”* memuat sejumlah tulisan akademis terkait beberapa masalah penting dalam praktik paradiplomasi dan beberapa studi kasus tentang berhasil tidaknya praktik paradiplomasi. Beberapa tulisan menarik lain terkait praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh gerakan nasionalisme Basque di Spanyol, perkembangan diplomasi Plurinasional di Uni

Eropa, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak referensi, terdapat satu karya yang dapat dijadikan acuan untuk melihat paradigma paradiplomasi secara teoritis dan praktis, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Alexander Kuznetsov (2020) yang berjudul "*Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Government in International Affairs*". Di dalam mahakaryanya tersebut penulis memuat tinjauan sistematis tentang dimensi teoritis paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hubungan internasional.

Berdasarkan uraian beberapa literatur di atas, dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik yang berfokus pada tantangan dan peluang. Alan Tidwell (2021) seperti yang disebutkan pertama sudah mengangkat tema paradiplomasi di Indo-Pasifik, namun ia belum membahas secara jelas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam praktik paradiplomasi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan tentang konsep paradiplomasi, peluang dan tantangan praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus studi kepustakaan melalui pencarian sumber referensi yang relevan dengan masalah yang dapat ditemukan dalam literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan di internet. Referensi teoritis yang diperoleh melalui studi literatur penelitian yang didapatkan langsung dari mesin pencarian Google Scholar berfungsi sebagai landasan dasar dan alat analisis utama dalam praktik penelitian dalam artikel ilmiah ini. Data yang dicari berkaitan dengan praktik paradiplomasi dan penerapannya di suatu daerah. Data-data tersebut dianalisis dan kemudian dikorelasikan dengan praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi fokus utama artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Praktik Paradiplomasi

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, praktik diplomasi juga ikut berkembang baik dari segi praktis maupun teoritis, demikian pula dengan para pelaku yang terlibat langsung dalam arena diplomasi. Pada mulanya, praktik diplomasi dilakukan oleh perwakilan pemerintah pusat dan organisasi internasional saja, namun, saat ini negara bagian ataupun provinsi atau kota di suatu negara juga bisa melakukan kegiatan diplomasi (Novialdy et al., 2022). Kegiatan kerja sama internasional yang dibangun tersebut lebih dikenal dengan istilah paradiplomasi, dimana kegiatan lokal skala global tersebut telah menjadi sebuah kajian penting dan istimewa dalam ilmu hubungan internasional.

Praktik paradiplomasi sudah sering dilakukan di negara-negara industri, namun masih kurang di negara-negara berkembang. Morin et al. (2022) melihat adanya gagasan yang tengah berkembang yang menganggap paradiplomasi sebagai fenomena yang hanya mampu dilakukan oleh negara berpendapatan tinggi. Anggapan tersebut tentunya agak keliru, dan untuk meluruskannya, terdapat tiga hal yang perlu dipahami dalam konsep paradiplomasi ini; pertama, paradiplomasi dapat melayani berbagai tujuan, termasuk pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, kemajuan teknologi, dan penegasan politik sub-negara (Novialdi et al., 2021). Dalam konteks ini, pengembangan kapasitas untuk bertindak di luar negeri dapat melayani berbagai kepentingan dalam jangka panjang. Setiap negara tentu memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, potensi yang dimiliki harus mampu dirawat dan dikembangkan agar menjadi pintu yang membuka minat negara luar untuk berkolaborasi di dalam bidang tertentu tersebut.

Kedua, pengembangan paradiplomasi harus menyesuaikan dengan kondisi domestik suatu negara (Novialdi et al., 2021). Di tingkat negara bagian, paradiplomasi berarti menciptakan banyak saluran dengan pemerintah pusat untuk bertukar informasi dan mengoordinasikan tindakan. Negara tidak serta merta menyambut agenda paradiplomasi, apalagi jika berasal dari kelompok yang memiliki identitas berbeda atau memiliki aspirasi nasionalis lokal sebagai aktor separatis (McHugh, 2015). Oleh karena itu, paradiplomasi dapat berubah menjadi protodiplomasi jika dipraktikkan oleh provinsi yang bermasalah dengan negara. Dan hal tersebut akan berujung kepada kesia-siaan, dikarenakan protodiplomasi jarang membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pelakunya (Ganohariti & Dijkhoorn, 2020).

Ketiga, paradiplomasi menghadirkan peluang sekaligus potensi jebakan bagi perkembangan demokrasi (Mauad, 2020), ini menjadi masalah yang sangat krusial bagi sejumlah kawasan di negara berkembang. Sisi positifnya, hubungan kelembagaan dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dapat menyebarkan nilai-nilai demokrasi dengan lebih prinsipil, dan melaksanakan proyek-proyek kolaboratif yang dapat mendorong keterlibatan dan mobilisasi masyarakat di tingkat lokal. Sementara itu, sisi negatifnya terlihat ketika aspek desentralisasi dari tindakan internasional dapat menghambat pertimbangan publik dan hubungan internasional karena hal ini biasanya dilakukan dalam konteks nasional. Unit sub-negara terlepas dari kategorisasi aktor internasional karena mereka bukan negara berdaulat. Namun, konseptualisasi mereka sebagai agen dalam politik domestik dan arena internasional tampaknya semakin dibutuhkan.

Secara umum, hal utama yang harus diperhatikan adalah peran sub-negara yang saat ini sangat penting dalam hubungan internasional. Kuznetsov (2020) menilai pemerintah daerah di seluruh dunia telah memainkan peran aktif dalam hubungan internasional dengan berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran ekonomi dan budaya, kegiatan-kegiatan tersebut secara teratur telah mampu mempromosikan kepentingan pembangunan di daerah. Provinsi dan kota memang harus diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya demi memenuhi kebutuhan spesifiknya. Namun, pemerintah pusat harus tetap mengawasi kewenangan ini. Jika praktik diplomasi yang dibangun menjadi terlalu jauh, bisa menjadi tahap awal peluang konflik dan separatisme (Ababakr, 2020), oleh karena itu pemerintah pusat harus mampu menyelesaikannya lebih awal melalui kegiatan preventif yang bernama pengawasan. Elcaputera (2021) menyatakan bahwasanya superioritas negara kesatuan akan terus kuat jika pemerintah pusat mampu melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap perilaku pemerintah daerah. Maka dengan begitu, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah bisa disebut sebagai upaya sinergisitas antar dua aktor dalam rangka menciptakan stabilitas kewenangan agar tidak tumpang tindih.

Praktik paradiplomasi dalam konteks pembangunan menjadi sebuah peluang akibat kesamaan identitas yang muncul oleh letak geografis, politik, budaya, dan lain sebagainya; dimana hal tersebut mampu menjadi faktor positif yang mendukung praktik paradiplomasi. Kekhasan identitas adalah komoditas politik utama yang dapat digunakan oleh setiap aktor dalam praktik paradiplomasi (Olomojobi & Omony, 2019). Secara khusus, kawasan Indo-Pasifik yang meliputi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memiliki negara yang beragam dan latar belakang yang berbeda-beda namun terikat dalam satu kawasan yang merupakan salah satu kawasan paling strategis di dunia, terutama dalam hal prospek maritim. Melalui praktik paradiplomasi dan sharing of power antara state government dan sub-state aktor di dalam negara, efektivitas dan efisiensi kerjasama internasional dapat dilaksanakan, bahkan politik luar negeri suatu negara akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Peluang Paradiplomasi di Indo-Pasifik

Konsep kedaerahan memang lebih diidentikkan dengan letak geografis. Namun dalam interaksi hubungan internasional saat ini, wilayah tidak selalu berkaitan dengan letak geografis tetapi telah berkembang menjadi asosiasi dengan penekanan pada kepentingan bersama, meskipun secara geografis berjauhan. Fawcett (2012) menyebutkan bahwa konsep kedaerahan saat ini dipahami dalam dua bagian, yaitu: kedaerahan lama (*old regionalism*) dan kedaerahan baru (*new regionalism*). Dalam jenis regionalisme lama, aktivitas bersama negara-negara di

kawasan tersebut karena merasa berada pada level yang sama dan secara otomatis terbentuk dari proses politik. Sementara itu, regionalisme baru adalah aktivitas bersama negara-negara dengan level yang berbeda dan terbentuk dari proses ekonomi.

Terkait dengan kawasan Indo-Pasifik, istilah regionalisme baru sepertinya lebih tepat untuk menggambarkan kawasan ini karena komposisi negara-negaranya yang terdiri dari ekonomi pada tingkatan yang berbeda. Meski demikian, kawasan Indo-Pasifik masih menjanjikan peluang yang sangat besar bagi kegiatan diplomatik. Thuong & Oanh (2021) menilai kawasan Indo-Pasifik sebagai pintu gerbang yang menghubungkan kekuatan besar dari negara-negara kecil ke dunia luar, dan terdapat keyakinan bahwa Indo-Pasifik ini cukup besar bagi setiap negara untuk tumbuh berkembang dan sejahtera. Secara prospek, Indo-Pasifik memiliki spesialisasi maritim potensial yang berpusat di kawasan Asia Tenggara (Medcalf, 2018), selain itu, kepariwisataan juga menjadi sektor prioritas pembangunan ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (Asthu, 2020). Sehingga kerjasama di bidang maritim dan pariwisata akan mendominasi kerjasama antar negara di kawasan Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik memiliki peluang besar untuk praktik paradiplomasi karena negara-negara di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak kesamaan antar sesamanya, seperti persamaan geografis, budaya, dan politik; yang mana hal ini merupakan salah satu indikator penting dalam praktik paradiplomasi. Seiring dengan bertambahnya aktor hubungan internasional yang memiliki otoritas dalam interaksi diplomasi; tidak hanya negara tetapi juga aktor sub-negara yang memiliki kebutuhan spesifik mereka sendiri. Di masa depan, aktor sub-negara memiliki peran penting dalam tata kelola internasional (Hale, 2018). Indonesia yang memiliki letak geografis yang menguntungkan melihat isu geopolitik maritim menjadi krusial bagi negara berkepulauan ini, oleh karena itu, Indonesia memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan yang prospektif bagi karena memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikerjasamakan (Oktaviano et al., 2020).

Dalam konteks paradiplomasi, praktik ini dapat diterapkan dalam beberapa bentuk kerja sama: *sister province*, *sister city*, dan *twin city*. Provinsi atau kota di kawasan Indo-Pasifik dapat saling berinteraksi - sesuai kewenangan yang diberikan oleh negara asal masing-masing - untuk menjalin kerjasama internasional dengan Provinsi atau kota lain di luar negeri. Kerja sama akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan efektif ketika sub-negara berkembang mampu menjalin kerja sama dengan sub-negara industri (Balliester & Elsheikhi, 2018), sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih efisien.

Kita contohkan saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan konsep wisata “*halal tourism*” yang tengah menjadi tren saat ini. Sub-state aktor dari Indonesia (Aceh) misalnya, bisa menjalin paradiplomasi dengan sub-state aktor dari negara Malaysia (Melaka) untuk mengoptimalisasikan kerjasama pemerintah daerah tersebut. Kemungkinan kerjasama Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Melaka akan bisa berjalan efektif dan efisien. Bukan tanpa alasan, jalinan kerjasama potensial tersebut akan dengan mudah bisa tercapai, melihat sejarah panjang diplomasi nusantara yang pernah berlangsung beberapa abad lalu yang melibatkan kesultanan Aceh dan kesultanan Johor (Wahyudi, 2017). Disatu sisi, Pemerintah Aceh sendiri telah memproyeksikan diri untuk menjadi destinasi unggulan dalam arena wisata halal (Herizal et al., 2021). Disisi lainnya, ternyata Malaysia merupakan negara dengan pertumbuhan pembangunan wisata halal terbaik di dunia (Aziz, 2018). Dengan begitu, best-practice penyelenggaraan wisata halal yang selama ini dilakukan oleh Malaysia dapat menjadi asupan yang berharga jika Aceh mampu membangun kembali romansa diplomatik yang pernah terjalin di masa lalu, sehingga di masa depan Aceh mampu mewujudkan halal tourism yang unggulan di tingkat regional maupun global.

Contoh lain yang bisa menjadi gerbang kerjasama adalah implementasi konsep smart city yang tengah coba digaungkan oleh sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan lainnya. Sejumlah hambatan terbentang di seruas jalas panjang suksesi “*smart city*” seperti minimnya sumberdaya manusia, rendahnya teknologi, dan kurangnya penerimaan atau kesiapan khalayak (Wahid & Amalia, 2020). Sementara itu, The Institute for Management Development (2021) menerbitkan Smart City Index 2021 yang merangkum peringkat kota pintar dari seluruh negara, dan di dalam daftar tersebut terdapat tiga kota kawasan Indo-Pasifik yang berhasil masuk dalam sepuluh besar terbaik, yaitu; Singapore (peringkat satu), Taipei (peringkat empat), dan Auckland (peringkat sembilan). Berkaca pada kondisi yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah, maka *lesson-learned* perlu diupayakan oleh setiap pemerintah daerah dengan menjalin hubungan dengan sejumlah kota di kawasan Indo-Pasifik yang telah menjadi kiblatnya *smart city* dunia.

Berkaitan dengan teknis kerjasama Paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik, ada beberapa langkah yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Langkah-langkah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Mukti (2013) dalam bukunya tentang paradiplomasi. Langkah-langkah tersebut di antaranya: (i) Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan inventarisasi potensi yang dimiliki oleh daerah; (ii) Pemerintah daerah menyusun *Country Profile* untuk meunjukkan keunggulan yang dimiliki daerah dan siap itu melakukan kerjasama untuk pembangunan bersama terkait potensi unggulan tersebut; (iii) Pemerintah daerah

melakukan publikasi melalui Web; (iv) Pemerintah daerah melakukan identifikasi mitra asing yang bisa diajak kerjasama paradiplomasi; (v) Pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan duta besar, agar bisa menghubungkan dengan mitra asing yang ada di Negara mereka; (vi) Pemerintah daerah melakukan negosiasi *Letter of Intent* dalam pertemuan awal dengan mitra, yang untuk selanjutnya akan melakukan kerjasama yang lebih formal; (vii) Pemerintah daerah selanjutnya membentuk tim negosiasi untuk melakukan perumusan draft MoU yang akan digunakan dalam kerjasama paradiplomasi; (viii) Sebelum melangkah ke tahap perundingan dan penandatanganan, rencana dan draft MoU ini akan dibahas di pihak *legislative daeri* sebuah pemerintah daerah yang akan melakukan praktik paradiplomasi; (ix) Pemerintah daerah melakukan perundingan dan MoU dengan pihak asing/mitra kerjasama paradiplomasi; (x) Pertemuan tim teknis masing-masing bidang kerjasama yang sudah direncanakan dan tercantum dalam MoU; (xi) Pembahasan Anggaran untuk setiap bidang kerjasama; (xii) Pemerintah daerah kedua belah pihak melakukan program kerjasama yang telah disepakati bersama; (xiii) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan bidang kerjasama.

Petunjuk teknis yang disebutkan di atas, bisa menjadi panduan dasar dalam praktik kerjasama luar negeri antara daerah di Kawasan Indo-Pasifik. Namun, saat ini yang dibutuhkan adalah kesadaran dari pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah daerahnya dalam melakukan praktik paradiplomasi.

Tantangan Paradiplomasi di Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik menjanjikan peluang yang cukup besar bagi praktik paradiplomasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan peluang tersebut cukup besar. Tantangan yang dihadapi antara lain memahami soft power yang digunakan oleh suatu provinsi atau kota dan menemukan mitra yang cocok untuk praktik paradiplomasi di kawasan Indo-Pasifik (Mendes & Figueira, 2017). Terdapat kesan yang sedikit menantang untuk memulai kerjasama internasional bagi provinsi atau kota di negara berkembang mengingat praktik paradiplomasi dan interaksi hubungan internasional yang belum terlalu familiar di kalangan pemerintah daerah.

Kedua, selama ini hubungan internasional masih didominasi oleh negara-negara, terutama di kawasan seperti Indo-Pasifik, sub-state actors masih kurang dikenal dibandingkan state actors. Padahal saat ini negara harus berbagi tugas dengan sub-negara bagian untuk kemajuan negara secara keseluruhan (Chambers, 2012). Selain itu, provinsi dan kota mungkin juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan kebijakan luar negeri negara pusat (Kenealy,

2012). Perbedaan kepentingan dalam pembangunan menjadi suatu hal yang lumrah jika bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik, asalkan tidak dibumbui oleh perbedaan kepentingan politik yang mampu menjerumuskan ke arah kehancuran kesatuan negara.

Ketiga, praktik paradiplomasi di Indo-Pasifik belum maksimal karena banyak praktik kerja sama luar negeri hanya mencapai tahap *Memorandum of Understanding* (MoU) saja tanpa adanya program implementasi yang nyata. Kalaupun kerjasama itu bisa diwujudkan, seringkali implementasinya gagal dan hanya sebatas penandatanganan MoU (Mukti, 2018). Artinya kerjasama masih belum efektif karena tujuan utama dari praktik paradiplomasi yaitu untuk membangun provinsi dan kota masih belum terpenuhi.

Keempat, pandemi COVID-19 yang mengancam stabilitas dalam negeri. Triwibowo (2020) mengungkapkan bahwa periode panjang COVID-19 mengakibatkan sejumlah negara tidak melakukan kegiatan diplomasi secara konstruktif karena tengah menghadapi tantangan jenis baru, akibatnya, diplomasi cenderung nasionalistik dan tidak mampu merespon hal yang bersifat internasional. Fitzgerald & Wong (2020) melihat dampak yang berbeda-beda yang dialami negara-negara di kawasan Asia-Pasifik; Vietnam, Selandia Baru, dan Australia misalnya memiliki hasil awal yang sangat bagus dalam menanggapi COVID-19, sedangkan kebanyakan negara lainnya mengalami masalah umum dengan kesiapsiagaan yang buruk dan kurangnya respons terpusat sehingga menghambat upaya untuk memerangi pandemi. Oleh karena itu, kerentanan terhadap COVID-19 mengakibatkan *state actors* maupun *sub-state actors* kawasan Asia-Pasifik yang lebih banyak mengfokuskan tenaga dalam memperbaiki kondisi internal, sehingga tidak sempat memikirkan urusan luar negeri.

KESIMPULAN

Kawasan Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis bagi hubungan internasional. Namun, saat ini kegiatan hubungan internasional di kawasan Indo-Pasifik masih didominasi oleh aktor negara, sedangkan sub-negara masih memiliki peran yang cukup kecil di kawasan Indo-Pasifik dalam kerangka praktik paradiplomasi. Sub-negara bagian (Provinsi dan Kota) memiliki kebutuhan spesifik mereka sendiri dan seringkali berbeda dari Provinsi atau Kota lain. Sehingga memberikan ruang kepada aktor non-negara untuk terlibat dalam kerjasama regional sangat penting. Namun, negara pusat tetap harus mengawasi kegiatan paradiplomasi ini agar kegiatan yang dilakukan memiliki program yang jelas dan dilaksanakan, tidak hanya seremonial atau penandatanganan MoU.

Indonesia yang merupakan bagian dari negara di kawasan Indo-Pasifik harus lebih berani dalam mendelegasikan praktik politik luar negeri mereka kepada aktor sub-negara

seperti Provinsi dan Kota. Melalui keterlibatan *sub-state actor* tersebut, tujuan politik luar negeri khususnya untuk kepentingan regional akan lebih mudah dicapai. Namun tentunya di balik peluang tersebut ada tantangan yang harus dihadapi. Provinsi yang ingin memisahkan diri dari negara pusat, memberikan kekuasaan yang terlalu luas untuk melakukan praktik paradiplomasi dapat disalahgunakan (protodiplomasi).

REFERENSI

- Ababakr, Y. M. (2020). Iraqi Kurdistan Region: From Paradiplomacy to Protodiplomacy. *Review of Economics and Political Science*. <https://doi.org/10.1108/REPS-01-2020-0002>
- Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy In Action: The Foreign Relations Of Subnational Governments*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315039497>
- Asthu, A. A. (2020). Efek Destinasi Pariwisata Terhadap Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Asia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 133–152. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.8>
- Aziz, A. H. B. A. (2018). Muslim Friendly Tourism: Concept, Practices and Challenges in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 355–363. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i11/4908>
- Balliester, T., & Elsheikhi, A. (2018). *The Future of Work: A Literature Review* (Issue 29).
- Chambers, G. (2012). Europe and Beyond: The Development of Sub-State Paradiplomacy with Special Reference to Catalonia. *Romanian Journal of Society and Politics*, 7(1), 7–26.
- Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 375–394. <https://doi.org/10.1177/0974928417731638>
- Cornago, N. (2018). Paradiplomacy and Protodiplomacy. In G. Martel (Ed.), *Encyclopedia of Diplomacy* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1002/9781118885154.dip10211>
- Dickson, F. (2014). The Internationalisation of Regions: Paradiplomacy or Multi-level Governance? *Geography Compass*, 8(10), 689–700. <https://doi.org/10.1111/gec3.12152>
- Elcaputera, A. (2021). Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.4116>
- Fawcett, L. (2012). The History and Concept of Regionalism. *European Society of International Law (ESIL) Conference Paper Series*, 4, 13–15.
- Fitzgerald, D. A., & Wong, G. W. K. (2020). COVID-19: A Tale of Two Pandemics Across the Asia Pacific Region. *Paediatric Respiratory Reviews*, 35, 75–80. <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2020.06.018>
- Ganohariti, R., & Dijxhoorn, E. (2020). Para- and Proto-Sports Diplomacy of Contested Territories: CONIFA as a Platform for Football Diplomacy. *The Hague Journal of Diplomacy*, 15(3), 329–354. <https://doi.org/10.1163/1871191X-BJA10027>
- Hakim, F. N., & Susilowati, I. (2020). Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia (Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri

- Pemprov DI Yogyakarta). *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 5(1), 49–80. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4274>
- Hale, T. (2018). *The Role of Sub-state and Non- state Actors in International Climate Processes* (Issue November).
- Herindrasti, V. L. S. (2019). Fenomena Indo-Pasifik dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.33541/japs.v3iq.965>
- Herizal, H., Rasanjani, S., & Mukhrijal, M. (2021). Kebijakan Kepariwisata di Provinsi Aceh: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Public Policy*, 7(1), 21–28. <https://doi.org/10.35308/jpp.v7i1.3341>
- Jackson, T. (2018). Paradiplomacy and political geography: The geopolitics of substate regional diplomacy. *Geography Compass*, 12(2), e12357. <https://doi.org/10.1111/gec3.12357>
- Kenealy, D. (2012). Commercial Interests and Calculated Compassion: The Diplomacy and Paradiplomacy of Releasing the Lockerbie Bomber. *Diplomacy & Statecraft*, 23(3), 555–575. <https://doi.org/10.1080/09592296.2012.706542>
- Kossa, M., Lomaeva, M., & Saunavaara, J. (2021). East Asian subnational government involvement in the Arctic: a case for paradiplomacy? *The Pacific Review*, 34(4), 664–695. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1729843>
- Kuznetsov, A. S. (2020). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Liu, T., & Song, Y. (2020). Chinese Paradiplomacy: A Theoretical Review. *SAGE Open*, 10(1), 2158244019899048. <https://doi.org/10.1177/2158244019899048>
- Magam, N. L. (2021). Trade and Security Cooperation in the SADC Region: Optimising the Developmental Role of Paradiplomacy. In K. Omeje (Ed.), *The Governance, Security and Development Nexus* (pp. 151–170). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49348-6_8
- Mahriun, D., & Putri, D. Z. (2020). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Penerimaan Pajak dan Ekspor Terhadap Perekonomian di Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 2(3), 25–32. <https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.12674>
- Mauad, A. C. (2020). *Paradiplomacy in Latin America: Between the Policy and the Research Agenda*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1708>
- McHugh, J. T. (2015). Paradiplomacy, protodiplomacy and the foreign policy aspirations of Quebec and other Canadian provinces. *Canadian Foreign Policy Journal*, 21(3), 238–256. <https://doi.org/10.1080/11926422.2015.1031261>
- Medcalf, R. (2018). Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific. In G. Rozman & J. C. Liow (Eds.), *International Relations and Asia's Southern Tier: ASEAN, Australia, and India* (pp. 9–28). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7_2
- Mendes, M. V. I., & Figueira, A. R. (2017). Paradiplomacy and the International Competitiveness of Cities: the case of Rio de Janeiro. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 60(1), e012. <https://doi.org/10.1590/0034-7329201700103>
- Mohammed, H. K., & Owtram, F. (2014). Paradiplomacy of Regional Governments in International Relations: The Foreign Relations of the Kurdistan Regional Government

- (2003 – 2010). *Iran and the Caucasus*, 18(1), 65–84. <https://doi.org/10.1163/1573384X-20140106>
- Moreno, L. (2016). Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Politics. *Regional & Federal Studies*, 26(2), 287–288. <https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1157072>
- Morin, J.-F., Fournier, V., & Paquin, S. (2022). The Federated Entities in Environmental Treaties (FEET) Dataset: Questioning Conventional Wisdom on Green Paradiplomacy. *Canadian Journal of Political Science*, 55(1), 226–241. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0008423921001001>
- Mukti, T. A. (2013). *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Mukti, T. A. (2018). Paradiplomacy and the Future of Aceh Government. *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*, 292, 50–56. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.8>
- Nganje, F. (2014). The Developmental Paradiplomacy of South African Provinces: Context, Scope and the Challenge of Coordination. *The Hague Journal of Diplomacy*, 9(2), 119–149. <https://doi.org/10.1163/1871191X-12341273>
- Novialdi, R., Ahmad, R., Muhammad, Z., Saputra, J., & Bon, A. T. (2021). A Review of Paradiplomacy Literature: Mini-Review Approach. *Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 6253–6268.
- Novialdi, R., Rassanjani, S., & Ramadani, I. (2022). The Practice of Paradiplomacy in Indo-Pacific Region: Opportunities and Challenges. *International Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.56225/ijassh.v1i1.33>
- Oktaviano, D., Mahroza, J., & Risman, H. (2020). Indonesia Defense Strategy Towards Indo-Pacific (Case Study: The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). *International Affairs and Global Strategy*, 80, 21–29. <https://doi.org/10.7176/iags/80-04>
- Olomjobi, Y., & Omony, O. (2019). Contested Sovereignty and Conflict: Between Spain and Catalonia. *Russian Law Journal*, 7(1), 138–153. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-1-138-153>
- Paquin, S. (2020). Paradiplomacy. In T. Balzacq, F. Charillon, & F. Ramel (Eds.), *Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice* (pp. 49–61). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3_4
- Poot, J., & Roskrige, M. (2020). Population Change in the Asia-Pacific Region: Trends, Issues and Models. In J. Poot & M. Roskrige (Eds.), *Population Change and Impacts in Asia and the Pacific* (pp. 1–26). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0230-4_1
- Rodrigues, G. M. A., & Mattioli, T. (2017). Paradiplomacy , Security Policies and City Networks : the Case of the Mercocities Citizen Security Thematic Unit. *Contexto Internacional*, 39(3), 569–587. <https://doi.org/10.1590/S0102-8529.2017390300006>
- Simons, G. (2019). Digital Communication Disrupting Hegemonic Power in Global Geopolitics. *Russia in Global Affairs*, 2, 108–130. <https://doi.org/10.31278/1810-6374-2019-17-2-108-130>

- Tavares, R. (2016). *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford University Press.
- The Institute for Management Development. (2021). *Smart City Index 2021*. https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/smart_city/smart_city_index2021.pdf
- Thuong, N. L. T., & Oanh, N. T. (2021). Vietnam in the Indo-Pacific Region: Perception, Position and Perspectives. *India Quarterly*, 77(2), 129–142. <https://doi.org/10.1177/09749284211005036>
- Tidwell, A. (2021). Strategic competition and the evolving role of Indo-Pacific paradiplomacy. *Australian Journal of International Affairs*, 75(1), 103–119. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1831437>
- Triwibowo, A. (2020). Diplomacy and COVID-19: a Reflection. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 103–112. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3861.103-112>
- Wahid, U., & Amalia, N. (2020). Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 35–51. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2300>
- Wahyudi, J. (2017). Model Diplomasi Kuno di Nusantara: Kasus Kesultanan Aceh dan Johor Abad XVI-XVII. *Buletin Al-Turas*, 23(1), 37–54. <https://doi.org/10.15408/al-turas.v23i1.4800>
- Wilson, J. D. (2018). Rescaling to the Indo-Pacific: From Economic to Security-Driven Regionalism in Asia. *East Asia*, 35(2), 177–196. <https://doi.org/10.1007/s12140-018-9285-6>